

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BERAU**

Dandy Ahmad Drajat

Nahwani Fadelan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau, dibuktikan berdasarkan hasil uji t, dimana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($3,587 > 2,306$) dan nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,007 < 0,05$). Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau, dibuktikan berdasarkan hasil uji t, dimana nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($0,130 < 2,306$) dan nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari nilai probabilitas ($0,900 > 0,05$). Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau, dibuktikan berdasarkan hasil uji F, dimana nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel ($7,012 > 4,46$) dan nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,017 < 0,05$). Kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kabupaten Berau selama tahun 2010-2020 rata-rata sebesar 20,9% dengan kriteria nilai interpretasi sedang, sementara kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah selama tahun 2010-2020 rata-rata sebesar 7,6% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur

pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Mayasari dalam Wulandari, 2019).

Alasan penulis memilih Kabupaten Berau sebagai objek penelitian adalah jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertambangan, sektor perkebunan maupun sektor-sektor lainnya, Kabupaten Berau dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%, dimana kedua tersebut punya andil cukup besar selain sektor pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi (Berau Dalam Angka 2020, 2020). Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar.

Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kabupaten Berau (Bapenda), pada 2020 telah ditargetkan penerimaan dari PAD sebesar

Rp194,76 miliar. Target penerimaan PAD itu berasal dari empat sumber yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah ditargetkan bisa memberikan kontribusi sebesar Rp61,85 miliar, retribusi daerah Rp9,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah Rp14,98 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp108,19 miliar (Bapenda Kabupaten Berau, 2021). Dari data di atas terlihat jelas bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan yang belum cukup dominan dibandingkan penerimaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD walaupun belum cukup dominan. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan, yang memiliki sifat memaksa, berdasar undang-undang pajak daerah, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dipakai untuk kebutuhan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak daerah sebagai kontribusi wajib dari penduduk kepada pemerintah daerah yang dipakai demi kepentingan pemerintahan serta kepentingan umum sebuah daerah.

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua

kelompok, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 21 Tahun 2011, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Mahmudi (2010:25), retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah

daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute/ contribution*, maknanya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain (Ahira, 2012:77).

Metodologi Penelitian

Alat Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) *release version 25.0 for Windows*. Adapun alat analisis yang

digunakan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai $VIF > 10$, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika $VIF < 10$, tidak terjadi multikolinearitas (Wijaya, 2011:119).

Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan metode uji runs test.

Uji Heteroskedastisitas

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser*.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a	=	Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	=	Koefisien regresi
X ₁	=	Pajak Daerah
X ₂	=	Retribusi Daerah

Koefisien Korelasi

Skala	Tingkat Korelasi
0,00 – 0,20	Sangat rendah (hampir tidak hubungan)
0,21 – 0,40	Korelasi yang lemah
0,41 – 0,60	Korelasi sedang
0,61 – 0,80	Korelasi cukup tinggi
0,81 – 1,00	Korelasi tinggi

Koefisien Determinasi

R Square (R^2)	Kategori
Lebih besar dari 0,5 ($> 0,5$)	Baik / Kuat
Sama dengan 0,5 ($= 0,5$)	Sedang
Kurang dari 0,5 ($< 0,5$)	Kurang Baik

Uji t

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

- Menentukan hipotesis pengujian
- Taraf signifikansi, dalam pengujian ini digunakan taraf sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$).
- Penentuan t-hitung dengan bantuan program SPSS ver 25.0.
- Menentukan t-tabel berdasarkan derajat kebebasan (df) dimana $\alpha/2$, $n - 1 - k$ (n = jumlah sampel, k = jumlah variabel bebas dan terikat)

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat secara simultan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-hitung (hasil output SPSS) dengan nilai F-tabel.

HASIL PENELITIAN

Pajak Daerah Kabupaten Berau

Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yaitu yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berikut penerimaan dari pajak daerah Kabupaten Berau selama periode tahun 2010-2020.

Tabel Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010-2020

Thn	Pajak Daerah (Rp)		Persentase (%)	Pertumbuhan (%)
	Target	Realisasi		
2010	6.625.915.000	4.725.512.349	71,3	-44,1
2011	15.541.404.000	18.941.209.855	121,9	300,8
2012	18.000.539.500	22.941.240.104	127,4	21,1
2013	25.336.500.000	31.035.602.709	122,5	35,3
2014	31.504.563.730	39.906.887.608	126,7	28,6
2015	34.529.471.000	39.038.258.298	113,1	-2,2
2016	36.922.909.000	38.864.730.631	105,3	-0,4
2017	42.777.056.000	48.728.109.332	113,9	25,4

2018	55.331.129.000	63.879.234.164	115,4	31,1
2019	86.057.497.000	74.832.606.199	87,0	17,1
2020	61.850.000.000	61.152.852.902	98,9	-18,3
Rata-rata	37.679.725.839	40.367.840.377	109,4	35,9

Sumber: BAPENDA Kabupaten Berau, 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah mampu mengumpulkan pajak daerah di atas target yang telah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Berau selama periode tahun 2010-2020 sebesar 35,9%.

Retribusi Daerah Kabupaten Berau

Retribusi daerah Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah Kabupaten Berau yang berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Berikut disajikan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah selama periode tahun 2010- 2020.

Tabel 5. Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010-2020

Thn	Retribusi Daerah (Rp)		Persentase (%)	Pertumbuhan (%)
	Target	Realisasi		
2010	17.682.139.000	12.019.764.402	68,0	-23,4
2011	6.240.440.000	38.511.612.270	617,1	220,4
2012	7.511.314.500	8.241.141.395	109,7	-78,6
2013	9.996.168.450	13.237.390.894	132,4	60,6
2014	10.789.846.900	14.455.148.405	134,0	9,2
2015	10.652.513.208	13.270.194.690	124,6	-8,2

2016	13.425.915.000	13.528.076.879	100,8	1,9
2017	12.687.454.100	14.628.916.920	115,3	8,1
2018	14.497.567.000	13.835.154.001	95,4	-5,4
2019	12.665.966.000	11.013.883.569	87,0	-20,4
2020	9.746.224.000	9.150.003.217	93,9	-16,9
Rata-rata	11.445.049.833	14.717.389.695	152,6	13,4

Sumber: BAPENDA Kabupaten Berau, 2021.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Berau selama periode tahun 2010-2020 adalah 13,4%. Persentase rata-rata realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Berau selama periode bersangkutan sebesar 152,6% atau rata-rata 52,6% di atas target penerimaan retribusi daerah yang telah direncanakan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Berau merupakan penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Berau selama periode tahun 2010-2020 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010-2020

Thn	PAD (Rp)		Persentase (%)	Pertumbuhan (%)
	Target	Realisasi		
2010	94.531.736.400	92.523.417.429	97,9	-38,0
2011	117.008.605.000	154.643.134.222	132,2	67,1
2012	119.025.212.896	157.187.447.557	132,1	1,6
2013	143.536.185.068	178.662.510.009	124,5	13,7
2014	186.926.484.871	240.856.792.138	128,9	34,8
2015	230.580.260.595	234.413.759.045	101,7	-2,7
2016	198.340.920.000	208.260.995.212	105,0	-11,2
2017	218.815.859.650	188.412.037.058	86,1	-9,5
2018	201.957.373.977	210.437.540.330	104,2	11,7
2019	254.117.448.800	231.015.862.553	90,9	9,8
2020	194.764.639.000	233.264.403.504	119,8	1,0
Rata-rata	178.145.884.205	193.607.081.732	111,2	7,1

Sumber: BAPENDA Kabupaten Berau, 2021.

Target penerimaan PAD yang ditetapkan selama periode tersebut rata-rata sebesar Rp178.145.884.205, dengan rata-rata realisasi penerimaan PAD sebesar Rp193.607.081.732. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Berau selama periode tahun 2010-2020 tercatat sebesar 7,1%. Rata-rata persentase realisasi penerimaan PAD sebesar 111,2%, artinya rata-rata telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 11,2%.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi data dikarenakan pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah harus terdistribusi secara normal dengan kata lain data akan mengikuti bentuk distribusi

normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria apabila tingkat signifikansi variabel (*Asymp. Sig.*) lebih besar dari 0,05 maka uji normalitas data terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresinya yang paling tinggi yaitu 1,755 dibandingkan koefisien regresi

retribusi daerah.

Uji t

Uji t statistik merupakan pengujian secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk membuktikan bahwa koefisien regresi ini secara statistik berpengaruh signifikan.

Pengaruh pajak daerah terhadap PAD Nilai t-tabel = 2,306 ($\alpha = 5\%$; $df = 11 - 1 - 2 = 8$) dan nilai t- hitung = 3,587. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa: t- hitung > t-tabel atau 3,587 > 2,306, artinya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Uji F

Uji F statistik berguna untuk pengujian secara serentak (simultan) apakah secara keseluruhan koefisien regresi tersebut signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Berau

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode tahun 2010-2020. Kontribusi paling besar yang diberikan pajak daerah pada PAD terjadi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 32,4%, dimanatingkat kontribusi ini termasuk dalam kriteria cukup baik. Sementara itu

tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang terendah terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 5,1% dan masuk kriteria sangat kurang baik. Besarnya kontribusi pajak daerah pada PAD selama tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 20,9% dengan kriteria nilai interpretasi sedang.

Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Berau

Kontribusi retribusi daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi retribusi daerah pada Tabel 16 di atas menyajikan hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama periode tahun 2010-2020. Kontribusi paling besar yang diberikan retribusi daerah pada PAD terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 24,9%, dimana tingkat kontribusi ini termasuk dalam kriteria sedang. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yang terendah tercatat di tahun 2020 yaitu sebesar 3,9% dan masuk kriteria sangat kurang baik. Besarnya kontribusi retribusi daerah pada PAD selama tahun 2010-2020 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 7,6%

dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Dibuktikan berdasarkan hasil uji t, dimana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($3,587 > 2,306$) dan nilai signifikansi (*Sig.*) lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,007 < 0,05$).
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Dibuktikan berdasarkan hasil uji t, dimana nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($0,130 < 2,306$) dan nilai signifikansi (*Sig.*) lebih besar dari nilai probabilitas ($0,900 > 0,05$).
3. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Dibuktikan berdasarkan hasil uji F, dimana nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel ($7,012 > 4,46$) dan nilai signifikansi (*Sig.*) lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,017 <$

$0,05$).

4. Kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kabupaten Berau selama tahun 2010-2020 rata-rata sebesar 20,9% dengan kriteria nilai interpretasi sedang, sementara kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah selama tahun 2010-2020 rata-rata sebesar 7,6% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang baik.

Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Berau sebaiknya lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan strategi jemput bola atau mengunjungi wajib pajak terutama yang potensial dan yang sering menunggak pembayarannya, disamping itu lebih aktif dalam menggali potensi-potensi yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penggalan potensi objek pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan sosialisasi

yang lebih masif dan kontinyu mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Berau, sehingga masyarakat luas dan investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Berau. Sosialisasi tersebut diantaranya mengenai potensi daerah wisata, potensi daerah perkebunan, potensi perikanan air laut maupun air tawar, dan potensi lainnya.

3. Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dan profesionalitas dari para pejabat pemerintahan, serta sistem yang terintegrasi dari pemerintah kabupaten hingga ke tingkat pejabat RT dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik:*

Problematisa Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat, Jakarta.

- Jannah, Hamida El Laila Eka Nur, Imam Suyadi, dan Hamidah Nayati Utami. 2016. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, **10** (1): 2016, Hal. 1-8.

- Riza, Faisal. 2018. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, **3** (3): 2018.

- Rosyidi, Suherman. 2013. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

- Suharyadi dan Purwanto. 2011. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.

- Wulandari, Veronika. 2019. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, **8** (4): 2019.